

ANALISIS PENDAPATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KOTA BATAM PADA TAHUN 2017-2020

Angeline Aurellia¹, Jeslin², Kristina³, Sherry⁴, Shinta Dewi⁵

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam

⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam

⁵Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam

2041356.angeline@uib.edu¹, 2041359.jeslin@uib.edu², 2041357.kristina@uib.edu³,
2041343.sherry@uib.edu⁴, 2041358.shinta@uib.edu⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui PDRB di Kota Batam. Data sekunder yang digunakan adalah data periode pada tahun 2017-2020. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan dengan mencari dan membaca referensi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 perekonomian terpengaruh oleh wabah COVID-19, sehingga PDRB Kota Batam menurun secara signifikan dari 5,92% menjadi -2,55%. Berbagai sektor mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, salah satunya adalah penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman dengan angka -45,49%. Kesimpulannya, baik PDRB maupun APBD mengalami penurunan yang signifikan di Kota Batam pada tahun 2020. Sebagai pertimbangan, pemerintah Indonesia dapat memulihkan perekonomian Batam dengan memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas serta mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi asing ke Batam.

Kata Kunci: PDRB, PDRB Batam, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to determine the GRDP in Batam City. The secondary data used is time-series data taken in 2017-2020. This research method uses qualitative analysis, a data collection technique that uses library research by finding and reading references from various sources. The results show that the Indonesian economy has increased from year to year until 2020 where there was a COVID-19 outbreak, henceforth significantly declining the GRDP of Batam from 5.92% to -2.55%. Various sectors experienced a massive downswing in economic growth, one of which was the provision of accommodation and food and beverage with a figure of -45.49%. In conclusion, both the GRDP and APBD experienced a significant decrease in the city of Batam in 2020. As a consideration, the Indonesian government could restore the economy of Batam by empowering qualified human resources, encouraging household consumption, and foreign investment into Batam.

Keywords: GRDP, Batam GRDP, Economic growth

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter ketika melaksanakan analisis mengenai pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi sendiri berguna untuk memperlihatkan sampai dimana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan pendapatan di wilayah tertentu (Vinda, 2021). Sedangkan menurut pendapat (Priyadi & Si, 2019), pertumbuhan ekonomi adalah suatu pertumbuhan dari total jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu wilayah. Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat besar karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi seperti SDA, SDM, keahlian atau kewirausahaan, dan juga sumber daya modal (Amam et al., 2019). SDM yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu dari segi kuantitas dan kualitasnya (Nugroho, 2016). Salah satu indikator yang penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka harus memiliki pendidikan yang mana sebagai modal dasar yang harus dipenuhi (Lubis, 2014).

Perkembangan perekonomian suatu daerah melalui pencapaian tingkat PDRB adalah suatu indikator yang penting dalam perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi sama dengan kenaikan PDRB yang dimana tidak melihat peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhannya penduduk atau perubahan dalam struktur

ekonomi yang berlaku maupun tidak (Lamaya & Mei, 2021). Dikutip dari Hartono, R., Busari, A., & Awaluddin, M. (2018), PDRB ialah salah satu aspek penting untuk memahami keadaan ekonomi pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB sendiri adalah sebuah data statistik dari seluruh kegiatan ekonomi yang mencakup total perolehan nilai tambah dari suatu daerah dengan 1 (satu) periode tertentu. Sumber utama dari PDRB, yaitu hasil transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat dalam suatu daerah. Dari nilai PDRB ini, kita dapat mengetahui dan menilai sejauh mana kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dari suatu daerah. Ada 2 jenis PDRB, yaitu PDRB atas Dasar Harga dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku. Adapun beberapa jenis pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung PDRB, yaitu *product approach*, *income approach*, *expenditure approach* (Suharmi, 2019). *Product approach* atau pendekatan produksi merupakan cara perhitungan PDRB untuk mengukur penghasilan nasional dengan cara menambahkan total akhir jasa dan barang dari semua unit usaha dari suatu wilayah pada waktu tertentu (Khasanah, 2017). Unit usaha tersebut dikategorikan menjadi beberapa sektor, yaitu sektor sumber daya alam (seperti peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan), sektor pertambangan, sektor listrik, air dan gas, sektor hotel dan restoran, sektor properti, sektor jasa dan keuangan (Putra et al., 2018). Kemudian, *income*

approach atau pendekatan pendapatan dapat diperhitungkan dengan cara menambahkan pendapatan yang berasal dari penghasilan rumah tangga, gaji, pajak tidak langsung dari suatu wilayah dengan periode tertentu (Setianingsih, 2017). Sedangkan *expenditure approach* atau pendekatan pengeluaran merupakan perhitungan PDRB dengan cara menambahkan total keseluruhan pengeluaran (Karlina, 2017) yang dilaksanakan oleh 4 kelompok dalam sektor perekonomian, seperti: (1) Sektor rumah tangga; (2) Sektor perusahaan; (3) Pemerintah dan; (4) Perdagangan luar negeri pada periode waktu tertentu (Pradnyana, 2017).

Anggaran merupakan suatu alat yang dimana untuk menyatukan proses perencanaan dan juga proses pengendalian (Mentang et al., 2020). Belanja daerah merupakan suatu kewajiban daerah yang dimana seluruh pengeluaran rekening kas umum daerah dikurangi dengan ekuitas dana lancar pada waktu 1 (satu) tahun anggaran (Ferdiansyah et al., 2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu kebijakan finansial yang disusun dengan beberapa pertimbangan agar susunan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi dapat dilakukan dengan mudah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Gagola et al., 2017). Menurut Halim (2007:15-16), ada beberapa unsur dalam APBD, antara lain: (1) Rencana aktivitas dari suatu daerah dengan uraian yang rinci; (2) Memiliki

target minimal dimana sumber penerimaan yang dapat menutupi dana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut; (3) Memiliki batas maksimal biaya pengeluaran yang akan dilakukan; (4) Jenis aktivitas serta proyek dituliskan dalam bentuk numerik; (5) Periode anggaran rata-rata dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (Rizal, 2019). Selain itu, APBD juga memiliki beberapa fungsi menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Sinaga, 2021), yang mana: (1) Fungsi Otorisasi, dimana APBD sebagai dasar untuk melakukan penghasilan serta biaya pada tahun yang bersangkutan (Ramadhani, 2020); (2) Fungsi Perencanaan, dimana APBD sebagai patokan bagi negara guna merancang aktivitas di tahun yang bersangkutan (Mulhakim, 2020); (3) Fungsi Pengawasan, dimana APBD sebagai segala aktivitas untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah sesuai dengan pedoman yang ditentukan (Mushafi, 2021); (4) Fungsi Alokasi, dimana APBD diarahkan agar dapat membangun lapangan kerja bagi tunakarya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi (Elsyayyid, 2020); (5) Fungsi Distribusi, dimana APBD harus dapat memperhatikan rasa adil dan kepatuhan (Octaviani, 2020); (6) Fungsi Stabilisasi, dimana APBD sebagai alat yang dapat memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental perekonomian (Arliman, 2020).

Kota Batam yang merupakan kota paling besar di Provinsi Kepulauan Riau dan

dengan letak wilayahnya yang cukup strategis maka berdampak pula pada pertumbuhan perekonomiannya. Hal ini yang menjadi alasan apabila dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam termasuk wilayah yang pertumbuhan ekonominya dapat meningkat dengan cepat.

Penetapan APBD dapat mempengaruhi kinerja PDRB suatu daerah. Meningkatnya APBD akan berpengaruh pula pada peningkatan PDRB begitupun sebaliknya. Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 154 angka 1 (Nellyanti & Abdullah, 2016) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilaksanakan jika terjadi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, (2) Keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran, (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari periode sebelumnya harus digunakan untuk periode berjalan, (4) Keadaan darurat dan (5) Keadaan luar biasa. Melandanya COVID-19 pada tahun 2020 telah berdampak besar pada perekonomian Indonesia, tidak terkecuali Kota Batam. Hal ini dapat diketahui dari data BPS Kota Batam yang menunjukkan peningkatan angka pengangguran dari 8,31% pada tahun 2019 menjadi 11,79% pada tahun 2020. (BPS, 2021) Meningkatnya pengangguran disebabkan oleh aksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) perusahaan yang ingin mengurangi pembiayaan operasi bisnis. Pemerintah menerapkan kebijakan work from home dan PPKM demi mengurangi penyebaran

virus COVID-19. Namun, hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat. Terbatasnya aktivitas masyarakat akibat kebijakan tersebut menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi berbagai sektor bisnis. Selain dari itu, Pandemi yang mendadak telah menyebabkan terjadinya pengeluaran yang tidak terencanakan seperti biaya impor vaksin dan berbagai peralatan kesehatan. Oleh sebab itu, pendapatan tidak seimbang dengan anggaran belanja. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka perekonomian Kota Batam akan mengalami defisit. Sehingga Kota Batam melaksanakan perubahan pada APBD tahun 2020 dalam rangka memulihkan perekonomian Kota Batam.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu ingin menganalisis dan mengidentifikasi struktur APBD di Kota Batam untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga keadaan ekonomi di Kota Batam pada tahun 2017-2020 melalui statistik dari data informasi pendapatan, pengeluaran serta pembiayaan daerah. Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi yang membaca. Tidak hanya itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian terkait dengan PDRB dan APBD, terutama pada Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah satu ilmu yang mempelajari mengenai metode-metode yang digunakan mengenai alat-alat dalam penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan dimana dengan mencari dan membaca referensi dari berbagai sumber baik dari *website*, jurnal, maupun artikel yang signifikan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Studi kepustakaan sangat diperlukan dalam penelitian ini karena dapat memberikan data serta informasi secara lebih mendalam mengenai data-data PDRB di Kota Batam pada tahun 2017-2020 yang diambil dari situs resmi www.batamkota.bps.go.id oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Batam.

Sumber data yang diperoleh berupa data sekunder yang didapatkan dari sumber lain

dalam bentuk *time series* atau deret waktu dari tahun 2017-2020. Kemudian data-data yang sudah dikumpulkan akan dimanfaatkan untuk memaparkan pendapatan dan juga pertumbuhan perekonomian di Kota Batam pada tahun 2017-2020 dengan menjabarkan informasi-informasi secara teoritis dan juga data-data yang berbentuk numerik secara jelas yang dapat mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi dan juga data yang didapatkan melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik Batam. Berikut adalah tabel persentase pertumbuhan atau perkembangan ekonomi di Kota Batam pada tahun 2017-2020.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam Tahun 2017-2020

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam				
Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,48	2,72	6,06	-0,47
Pertambangan dan Penggalian	0,41	-1,78	1,43	-3,64
Industri Pengolahan	1,68	3,5	7	3,78
Pengadaan Listrik dan Gas	6,1	-1,02	4,23	-2,67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,39	3,14	7,23	-2,83
Konstruksi	3,07	8,23	6,92	-6,98
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,79	6,92	4,49	-14,7
Transportasi dan Perdagangan	3,99	1,43	-17	-44,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,88	10,18	9,62	-45,5
Informasi dan Komunikasi	7,5	12,85	11,97	18,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,23	6,09	4,94	-1,18
Real Estate	3,87	-5,13	2,1	-16,7
Jasa Perusahaan	4,1	7,19	-8,74	-43,3

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam				
Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-0,02	8,31	1,08	12,23
Jasa Pendidikan	7,25	2,27	0,71	-5,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,83	3,7	2,1	-2,09
Jasa Lainnya	5,98	16,82	1,97	-68
PDRB Kota Batam	2,61	4,96	5,92	-2,55

Sumber: BPS, 2021

Pada tabel 1, dapat diketahui bahwa rata-rata sektor mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 dikarenakan pandemi yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, terlebih lagi untuk sektor Jasa Lainnya mengalami penurunan pesat hingga mencapai angka -67,98% pada tahun 2020 dari 1,97%. Pada sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan beranjak turun pada tahun 2020 khususnya untuk sektor transportasi. Selain sektor yang telah dijelaskan, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami penurunan yang cukup pesat pada tahun 2020.

Selain penurunan, ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan seperti sektor informasi dan komunikasi yang tetap mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, begitu pula dengan sektor industri pengolahan yang meningkat selama 3 tahun terakhir tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan

jaminan sosial juga mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2019 sektor ini mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi pada sektor-sektor ini juga berdampak kepada PDRB Kota Batam yang terlihat pada tabel 1 di atas bahwa PDRB Kota Batam mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik saat tahun 2019 namun menurun hingga minus pada tahun 2020.

Hal ini menyebabkan pemerintah Kota Batam harus mengubah anggaran pendapatan belanja daerah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	2.958.894.580.542,07	2.557.703.996.680,27
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.499.536.772.588,46	1.030.466.996.128,27
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1.225.272.547.554,19	831.729.178.616,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	124.510.000.000,00	82.126.417.304,48
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.685.992.811,00	8.601.742.730,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.068.232.223,27	108.009.657.477,79
4.2.	Dana Perimbangan	1.122.250.236.200,00	1.136.574.471.091,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	169.996.390.200,00	252.646.420.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	691.627.204.000,00	633.957.071.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	260.626.642.000,00	249.970.980.091,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	337.107.571.753,61	390.662.529.461,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	101.000.000.000,00	118.212.516.461,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	209.026.589.753,61	231.859.244.000,00
4.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	2.000.000.000,00
4.3.8.	Dana Insentif Daerah (DID)	27.080.982.000,00	38.590.769.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.958.894.580.542,07	2.557.703.996.680,27
5.	BELANJA	3.013.894.580.542,07	2.593.084.529.418,44
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.097.735.712.311,45	1.071.998.556.231,58
5.1.1.	Belanja Pegawai	974.805.139.767,45	917.677.076.275,18
5.1.4.	Belanja Hibah	98.701.002.544,00	81.775.125.544,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	9.229.570.000,00	3.017.070.000,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	69.529.284.412,40
5.2.	Belanja Langsung	1.916.158.868.230,62	1.521.085.973.186,86
5.2.1.	Belanja Pegawai	364.994.895.270,58	375.329.428.567,41
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.249.041.425,52	829.964.114.438,01
5.2.3.	Belanja Modal	840.914.931.534,52	315.792.430.181,44
	JUMLAH BELANJA	3.013.894.580.542,07	2.593.084.529.418,44
	SURPLUS/(DEFISIT)	-55.000.000.000,00	-35.380.532.738,17
6.	PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00	35.380.532.738,17
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.000.000.000,00	35.380.532.738,17
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	55.000.000.000,00	35.380.532.738,17
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00	35.380.532.738,17
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0
	PEMBIAYAAN NETO	55.000.000.000,00	35.380.532.738,17
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0

Sumber: BPKAD Batam

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah APBD secara keseluruhan. APBD dan PDRB memiliki hubungan yang linear, ketika APBD menurun maka akan berpengaruh pada penurunan PDRB begitupun sebaliknya. PDRB dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor bersih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah APBD juga dapat mempengaruhi keempat faktor tersebut. Jika diperhatikan dari kondisi pandemi COVID-19, APBD yang menurun dapat mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga akibat dari kurangnya daya beli masyarakat. APBD yang menurun dapat membatasi pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi. APBD yang menurun dapat mengurangi minat investor dalam berinvestasi pada usaha Kota Batam dikarenakan dari sudut pandang investor pemerintah akan terkesan kurang mendukung usaha Kota Batam. Menurunnya APBD berarti pemerintah menyalurkan lebih sedikit dana dalam membantu usaha, terutama bagi usaha yang masih dalam tahap permulaan yang sangat membutuhkan bantuan dana. Terakhir, APBD yang menurun mengakibatkan penurunan ekspor bersih dikarenakan produktivitas tenaga kerja menurun akibat dari kurangnya infrastruktur daerah sehingga jumlah produk yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

Dapat diperhatikan pada tabel 2, diketahui bahwa untuk kelompok pendapatan sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 2,9 triliun, namun berubah menjadi sebesar Rp. 2,5 triliun, dan kelompok pendapatan yang mengalami perubahan cukup signifikan ialah hasil pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp. 393 miliar. Pemungutan pajak mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar sektor bisnis pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, melalui tabel 1 dapat diperhatikan bahwa sebagian besar angka dalam keadaan minus. Perubahan pendapatan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan pertumbuhan perekonomian atau PDRB dikarenakan pemerintah memiliki lebih sedikit dana dalam memutar roda perekonomian. Pada saat yang bersamaan anggaran belanja juga dikurangi untuk meminimalisir kerugian pemerintah. Dapat diperhatikan pada tabel 2, sebelum terjadi perubahan APBD terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan dan anggaran belanja sehingga terjadi defisit Rp. 55 miliar. Demi membantu sektor bisnis dan memulihkan perekonomian dalam jangka waktu yang panjang maka pemerintah mengurangi jumlah APBD.

Selain itu, pada kategori belanja juga mengalami penurunan dimana pada awalnya sebesar Rp. 3 triliun menurun hingga Rp. 2,5 triliun, dan kelompok belanja yang mengalami perubahan cukup signifikan ialah belanja

modal yang menurun hingga Rp. 525 miliar. Tidak hanya itu, belanja langsung juga mengalami penurunan pesat sampai dengan Rp. 395 miliar. Perubahan jumlah anggaran belanja memiliki pengaruh yang signifikan pada beberapa faktor sosial dan ekonomi sebagai berikut:

1. Penurunan perekonomian
2. Peningkatan angka pengangguran
3. Penurunan pendapatan per kapita
4. Peningkatan kemiskinan

Penurunan jumlah anggaran belanja setelah perubahan pada tahun 2020 akan mengurangi pengeluaran pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur Kota Batam. Masyarakat dalam usia produktif tidak dapat menggunakan sarana dan prasarana dengan nyaman sehingga produktivitas kerja berkurang. Produktivitas akan berpengaruh langsung terhadap pengurangan *ouput* produk dan jasa akhir yang merupakan nilai total bagi PDRB dalam satu periode seperti yang telah ditunjukkan pada tabel 1 terjadi penurunan PDRB menjadi -2,55%. PDRB yang mengalami penurunan tentu berpengaruh pada perekonomian Kota Batam secara langsung.

Penurunan anggaran belanja berpengaruh pada peningkatan pengangguran karena pemerintah membatasi pengeluaran dalam membentuk program sosial untuk membantu sektor bisnis sehingga bisnis yang mengalami kerugian akan mengurangi biaya operasi dengan aksi PHK dan penurunan gaji. Hal inilah yang menyebabkan semakin

banyaknya akan pengangguran pada tahun 2020. Berdasarkan data dari BPS Kota Batam menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka pengangguran dari 2019 hingga 2020 secara berturut-turut dari 8,31% menjadi 11,79%. (BPS Kota Batam, 2021)

Selanjutnya, pendapatan per kapita akan mengalami penurunan atau lebih tepatnya tidak merata. Hal ini dikarenakan semakin tingginya angka pengangguran yang menandakan sejumlah orang tidak memiliki sumber pendapatan. Bahkan yang memiliki pekerjaan dapat mengalami pengurangan gaji akibat dari penghematan biaya perusahaan. Salah satu contoh berupa kasus Fabelio dimana tenaga kerja Fabelio diberikan dua pilihan antara mengundurkan diri dan memperoleh semua kompensasi yang patut diperoleh ataupun tetap bekerja namun dengan gaji yang tertunda pembayarannya (Kompas.com, 2021). Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi para pekerja yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan harus dipaksa mengundurkan diri akibat dari kondisi ekonomi yang kurang baik.

Kemudian penurunan anggaran belanja juga mempengaruhi peningkatan kemiskinan. Populasi yang miskin tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan mungkin memperoleh informasi yang salah dan miskomunikasi (Kurniasih, 2020) Hal ini diakibatkan dari kurangnya penyaluran dana untuk bantuan sosial yang berubah dari Rp. 9 miliar menjadi Rp. 3 miliar sesuai dengan tabel 2. Sehingga

produktivitas masyarakat menurun dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Penyebab lainnya juga dikarenakan meningkatnya pengangguran sehingga pendapatan per kapita berkurang dan daya beli masyarakat semakin rendah. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan pertumbuhan perekonomian Kota Batam.

Namun, pengaruh negatif tersebut akan berkurang seiring berjalannya waktu. Perubahan APBD tahun 2020 bertujuan untuk membantu sektor bisnis agar memiliki peluang untuk memulihkan perekonomian Kota Batam. Pada tabel 2 ditunjukkan bahwa setelah perubahan APBD diperkirakan akan terjadi penurunan angka defisit dari Rp. 50 miliar menjadi Rp. 33 miliar yang merupakan langkah pertama menuju pemulihan ekonomi Kota Batam.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa perekonomian periode 2017-2020 selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi angka -2,55%. Demi pemulihan perekonomian pemerintah Kota Batam melaksanakan perubahan APBD 2020 dengan menurunkan jumlah pendapatan dan belanja daerah. Dalam jangka waktu yang pendek upaya ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan pertumbuhan perekonomian, peningkatan pengangguran, penurunan

pendapatan per kapita, dan peningkatan kemiskinan.

Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Batam, yaitu terus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong konsumsi rumah tangga, dan mendorong investasi asing ke Kota Batam agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali normal.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan artikel penelitian ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu karena adanya bantuan serta dukungan oleh pihak-pihak terkait. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: (1) Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah memberikan rahmat serta karunianya pada penulis, dan (2) Bapak Yulfiswandi, S.E., M.M. Selaku dosen pengajar mata kuliah Teori Ekonomi Makro.

DAFTAR PUSTAKA

- Amam, A., Jadmiko, M. W., Harsita, P. A., & Poerwoko, M. S. (2019). Model Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Berdasarkan Faktor Aksesibilitas Sumber Daya. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 14(1), 61–69.
- Arliman, L. (2020). Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 189–201.
- BPS Kota Batam. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2018-*

2020. Retrieved December 18, 2021, from <https://batamkota.bps.go.id/indicator/6/208/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html>
- Elsyayyid, M. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 14(1), 44–52.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(1).
- Karlina, B. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 6(1), 16–27.
- Khasanah, U. (2017). *Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan Spasial Autoregressive Model Panel Data*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Kompas.com. (2021). *Keuangan Perusahaan Buruk, Fabelio Bantah Paksa Karyawan "Resign"*. Retrieved December 18, 2021, from <https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/18/053000721/keuangan-perusahaan-buruk-fabelio-bantah-paksa-karyawan-resign-?page=all>
- Kurniasih, E. P. (2020). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak*.
- Lamaya, F., & Mei, N. N. (2021). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 8(2), 43–49.
- Lubis, C. A. B. E. (2014). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Economia*, 10(2), 187–193.
- Mentang, F., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2020). Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 131–138.
- Mulhakim, A. (2020). *Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas XI IPS MAN 3 Jembrana Tahun Ajaran 2019/2020*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mushafi, M. (2021). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Kajian Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1).
- Nellyanti, D., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).
- Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh Pendidikan

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 29(2).
- Octaviani, A. (2020). *Analisis yuridis atas tindakan abuse of transfer pricing pada peraturan menteri keuangan No. 213/PMK. 03/2016= Juridical Analysis Of Abuse Of Transfer Pricing Actions In Regulation Of The Minister Of Finance No. 213/PMK. 03/2016*. Universitas Pelita Harapan.
- Pradnyana, I. G. G. O. (2017). Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar. *Forum Manajemen STIMI Handayani Denpasar*, 10(1), 73–84.
- Priyadi, U., & Si, M. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam (2000-2017)*.
- Putra, F. H., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018). Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 2012-2016. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(1), 71–74.
- Ramadhani, U. S. (2020). *Implementasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas APBD (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Rizal, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Setianingsih, W. (2017). *Pengaruh Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotajambi*.
- Sinaga, R. A. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019*.
- Suharmi, I. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ekombis*, 4(2).
- Vinda, M. (2021). *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2018)*. Uin Raden Intan Lampung.